

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

##### **5.1.1 Komunikasi Organisasi PPID Pembantu**

Proses komunikasi organisasi yang terjadi pada PPID Pembantu berjalan secara lisan atau secara langsung dan juga melalui surat. Komunikasi yang terjadi juga memperhatikan urutan struktur organisasi PPID Pembantu. Urutan struktur yang dimaksud komunikasi dari atasan ke bawahan. Namun komunikasi secara lisan dapat digantikan menggunakan media Whatsapp dan surat jika pihak yang bersangkutan tidak berada di tempat / kantor. Surat digunakan jika pesan bersifat resmi dari OPD dan dari PPID Utama. Maka komunikasi organisasi yang terjadi berdasarkan situasi dan kondisi.

##### **5.1.2 Komunikasi Pemerintahan PPID Pembantu**

Komunikasi pemerintahan yang terjadi berupa pelaksanaan tugas dan wewenang PPID Pembantu. Tugas PPID Pembantu dalam memberikan pelayanan informasi berkala yang wajib diumumkan pada situs resmi Badan Publik dan melakukan proses verifikasi data. Namun tidak semua OPD melakukan tugas dan proses verifikasi sesuai peraturan. 19 OPD yang melakukan proses verifikasi data tentang informasi berkala. Proses verifikasi menjadi proses penting untuk menentukan informasi berkala layak atau tidak diunggah pada situs resmi.

### **5.1.3 Informasi Publik Yang Terdapat di Situs Resmi OPD**

10 Informasi berkala wajib diumumkan pada situs resmi Badan Publik. Menjadi informasi dasar yang harus diumumkan oleh setiap PPID Pembantu pada situs resmi. Namun tidak seluruh OPD mengumumkan 10 informasi berkala pada situs resminya. 2 OPD yang kurang mengumumkan 10 standar informasi berkala yakni DKP dan Sekwan. Kurangnya informasi berkala pada situs resmi Badan Publik karena informasi bukan wewenang OPD untuk mengumumkan, serta informasi sudah masuk dalam situs utama Provinsi Jawa Tengah. Maka informasi tersebut tidak dimasukkan ke dalam situs resmi OPD. Alasan tersebut digunakan juga untuk 8 OPD yang tidak lengkap mengumumkan informasi berkala pada situs resmi Badan Publik.

### **5.1.4 Implementasi Informasi Berkala**

Proses implementasi informasi berkala wajib dilakukan OPD untuk memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat melalui situs resmi Badan Publik. Dalam pengimplementasiannya OPD mengalami kendala seperti koneksi yang tidak stabil dan situs resmi Badan Publik diretas oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Kendala tersebut harus segera diselesaikan oleh OPD. Karena informasi yang diumumkan pada situs resmi juga dinilai oleh KIP sebagai Komisi yang bergerak di bidang pelayanan publik. Penilaian tersebut menjadi indikator setiap situs OPD menjadi situs yang informatif atau belum.

### **5.1.5 Layanan Situs Resmi Badan Publik**

Kecepatan dan ketepatan layanan yang diberikan OPD melalui situs resminya dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti jumlah pengunjung situs, jumlah pemohon informasi dan tanggapan dari pemohon informasi. Pengunjung situs yang tinggi harus dilengkapi dengan tampilan situs yang menarik dan informatif. Hal tersebut meningkatkan jumlah pemohon informasi publik. Banyaknya pemohon informasi membuktikan bahwa situs resmi OPD informatif. Walaupun tidak semua situs resmi OPD memberikan informasi yang lengkap sesuai dengan peraturan.

Tingginya pengunjung situs dan jumlah pemohon informasi membuktikan, proses implementasi informasi berkala berdasarkan Perki No. 1 Tahun 2010 tentang tentang informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala pada situs resmi Badan Publik sudah dilakukan. Walaupun ada 2 OPD yakni DKP dan Sekwan yang tidak melakukan proses implementasi informasi berkala secara keseluruhan. Implementasi informasi berkala juga didukung proses komunikasi organisasi dan pemerintahan yang sesuai, untuk terbentuknya situs yang menarik dan informatif.

## **5.2 Saran**

### **5.2.1 Organisasi Perangkat Daerah (OPD)**

Memperbaiki komunikasi pemerintahan yang dilakukan antara Anggota PPID Pembantu dengan Bidang-Bidang OPD dalam hal waktu pengumpulan informasi yang akan diunggah ke situs resmi OPD. Selain itu

meningkatkan komunikasi antara PPID Pembantu dengan KIP dalam hal proses penilaian situs resmi OPD yang lebih transparansi.

### **5.2.2 Komisi Informasi Pusat (KIP)**

Dalam melakukan penilaian perlu adanya koordinasi yang matang dengan setiap OPD. Koordinasi tersebut dalam hal penentuan tema penilaian, hal yang perlu disiapkan OPD dalam penilaian, dan transparansi proses penilaian yang dilakukan oleh KIP. Hal tersebut dilakukan untuk menghilangkan kecurigaan OPD terhadap proses penilaian KIP yang bersifat objektif.



## TATAKALA PENELITIAN

No.	Nama Kegiatan	Bulan																																															
		Sep-19				Okt-19				Nov-19				Des-19				Jan-20				Feb-20				Mar-20				Apr-20				Mei-20				Jun-20				Jul-20				Agust-20			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4								
1.	Penentuan Topik																																																
2.	Pembuatan Proposal																																																
3.	Seminar Proposal																																																
4.	Pengumpulan Data																																																
5.	Analisis Data																																																
6.	Penulisan Laporan																																																
7.	Sidang Akhir																																																